

# Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung

Ulfa Umayasari, Goestyari Kurnia Amantha

Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

## ARTICLE HISTORY

Received : 15 Maret 2025

Revised : 20 Juni 2025

Accepted : 29 Juni 2025

## KEYWORDS

Digital Participation, E-Participation;  
Regional Accountability; Lampung  
Regional Government; Digital Democracy;

## CORRESPONDENSI

Nama : Ulfa Umayasari

Email : [ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id](mailto:ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id)



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## ABSTRACT

*This study examines the phenomenon of citizen participation through digital media and its implications for accountability and regional policy formulation in Lampung Province. Starting from the rapid penetration of the internet and the digitalization of regional government services, this study explores the opportunities and challenges of e-participation to expand transparency, responsiveness, and the quality of regional governance. Using literature study methods and secondary data analysis, this study answers questions about the urgency of digital participation, theoretical foundations related to e-governance and digital democracy, an overview of the phenomenon of digital participation of Lampung citizens, and policy recommendations for strengthening regional accountability. The results of the study show that digital participation in Lampung has grown significantly, as seen from the example of the virality of citizen criticism regarding infrastructure that triggered responses from regional and central governments. Digital participation also has a positive impact on increasing transparency and the quality of regional policies. However, challenges related to digital literacy, technological gaps, and bureaucratic resistance still need to be anticipated so that digital civic engagement can grow inclusively and have a real impact on regional government.*

## Pendahuluan

Partisipasi digital melalui media sosial dan platform daring kini menjadi salah satu bentuk keterlibatan warga yang berkembang pesat dalam konteks demokrasi lokal (Oktavia et al., 2024). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital ini melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres 95/2018. Hasilnya cukup signifikan, ditunjukkan dengan kenaikan peringkat Indonesia dalam E-Participation Index PBB tahun 2022 ke posisi 37 dengan skor 0,7159. Di tingkat daerah, Provinsi Lampung juga menunjukkan kemajuan dengan peningkatan indeks SPBE dari 3,37 (2022) menjadi 3,81 (2023), yang kemudian mengantarkan daerah ini meraih Digital Government Award 2024. Namun demikian, kemajuan ini belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif warga dalam tata kelola pemerintahan daerah (Kencono et al., 2024).

Masalah partisipasi digital di Lampung mencuat ketika warga menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah, seperti kasus viral pada tahun 2023 terkait infrastruktur jalan yang mendapat respon hingga ke tingkat pemerintah pusat. Meskipun menunjukkan efektivitas *e-participation*, peristiwa tersebut juga memperlihatkan adanya resistensi dari pejabat lokal, seperti upaya intimidasi terhadap pengkritik (Yanto & Sutoto, 2024). Hal ini menandakan bahwa partisipasi digital belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari mekanisme demokrasi lokal. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan teori *e-participation* dan akuntabilitas pemerintahan untuk menganalisis bagaimana partisipasi warga melalui media digital memengaruhi transparansi dan responsivitas pemerintah daerah.

Konsep digital civic engagement atau partisipasi warga melalui media digital berakar pada prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public (Nurchotimah, 2021). Dalam kerangka good governance, partisipasi digital merefleksikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Artinya, penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk melibatkan warga dipandang sukses bukan hanya jika dilihat dari aspek teknis, tetapi sejauh mana dapat memperkuat praktik pemerintahan yang demokratis dan partisipatif (Ibrahim & Olli, 2024). Dengan menggabungkan dan mensintesis aspek fokus dari dua aliran teoritis partisipasi warga negara dan tata kelola interaktif dengan cara baru untuk mengidentifikasi, mengilustrasikan, dan menganalisis lapisan tata kelola yang diperlukan untuk partisipasi warga negara (Pribadi, et al., 2024).

Partisipasi digital warga tidak hanya penting dalam konteks pelayanan, tapi juga dalam akuntabilitas sosial (Asmuddin, 2025). Akuntabilitas sosial didefinisikan sebagai pendekatan di mana warga negara dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah. Akuntabilitas sosial menempatkan masyarakat sebagai pihak yang proaktif mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut transparansi. Dalam era digital, akuntabilitas sosial memperoleh medium baru melalui platform online: warga dapat secara kolektif mengawasi, melapor, atau memprotes penyimpangan kebijakan dengan cepat dan luas jangkauannya (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Literasi digital masyarakat juga menentukan keberhasilan *e-participation*. Banyak penelitian menyoroti bahwa rendahnya literasi digital, terutama di kalangan lansia, kelompok pendidikan rendah, atau masyarakat daerah 3T, menjadi penghalang utama partisipasi online (Veronika et al., 2022). Jika warga kesulitan memahami cara kerja platform digital pemerintah atau tidak terbiasa mengekspresikan pendapat secara online, maka

potensi partisipasi tak tersalurkan optimal. Demikian pula, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah berpengaruh penting: ketika warga percaya bahwa sistem digital aman dan aduan mereka ditindaklanjuti dengan efisien, partisipasi cenderung meningkat. Sebaliknya, jika warga meragukan keamanan data atau menganggap suaranya tidak didengar, mereka akan enggan menggunakan *platform e-government* (Ariesmansyah & Lastari, 2024).

Beberapa konsep teori adopsi teknologi seperti Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989) menggarisbawahi hal di atas: persepsi usefulness (manfaat) dan ease of use (kemudahan penggunaan) layanan *e-government* akan menentukan kesediaan masyarakat terlibat. Karena itu, desain sistem partisipasi digital yang user-friendly dan sesuai kebutuhan pengguna sangat vital. Pemerintah perlu memastikan aplikasi atau situs partisipasi yang dikembangkan benar-benar mudah diakses dan dipahami berbagai kalangan. Selain itu, media sosial resmi pemerintah yang interaktif juga menjadi kanal partisipasi tak formal namun efektif. Instansi publik yang aktif di Instagram, Twitter (X), atau Facebook, misalnya, dapat membangun citra keterbukaan informasi sekaligus kedekatan dengan publik. Website dan twitter pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Ketika warga merasa suaranya didengar dan direspons cepat melalui kanal digital, mereka lebih terdorong terlibat dalam proses pemerintahan. Pemanfaatan media dalam pengelolaan pemerintahan daerah harus mendukung proses demokratisasi pemerintahan agar membentuk masyarakat partisipatif (Harahap, 2023).

Penelitian ini mengisi celah (gap) penting dalam literatur, karena sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada capaian digitalisasi secara nasional, tanpa mengulas secara mendalam dinamika dan implikasi partisipasi digital di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Lampung. Maka, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kunci sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan dinamika partisipasi digital warga di Provinsi Lampung? (2) Apa saja peluang dan tantangan dalam pelaksanaan e-participation di tingkat lokal? (3) Sejauh mana partisipasi digital berdampak terhadap akuntabilitas dan perumusan kebijakan pemerintah daerah?

## Metode

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan studi literatur dan data sekunder (*library research*). Desain penelitian adalah deskriptif-analitis dengan metode kualitatif, namun mengintegrasikan temuan-temuan kuantitatif (jika tersedia) dari data sekunder untuk memperkaya analisis (pendekatan mix-method secara sekunder) (Febrianto & Siroj,

2024). Adapun rincian metodologi yang digunakan sebagai berikut: Sumber Data: Penelitian mengandalkan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya. Sumber utama mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan riset, publikasi pemerintah (misal: data BPS Lampung, dokumen KemenPAN-RB, laporan SPBE), serta artikel berita/kajian terkini yang relevan dengan topik. Misalnya, data statistik penggunaan internet di Lampung diperoleh dari BPS, informasi praktik e-government Lampung dari rilis KemenPAN-RB, dan contoh kasus partisipasi digital di Lampung dari pemberitaan media. Sumber-sumber ilmiah tentang teori partisipasi digital, e-governance, dan akuntabilitas juga dikaji (termasuk publikasi UNDP, OECD, dan penelitian akademik terbaru).

Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur secara mendalam. Peneliti menggunakan kata kunci terkait ("*e-participation Lampung*", "digital civic engagement Indonesia", "akuntabilitas sosial digital", dll.) melalui database jurnal, portal berita, situs pemerintah, dan mesin pencari akademik. Setiap informasi yang diperoleh kemudian dievaluasi kredibilitasnya dan dicatat bersama sumber rujukannya. Karena studi ini bersifat kualitatif, tidak ada kuesioner atau wawancara langsung; namun data kuantitatif seperti persentase pengguna internet, peringkat indeks, jumlah aduan LAPOR!, tetap dikumpulkan dari dokumen resmi untuk dianalisis sebagai pendukung argumen.

Teknik Analisis Data: Data dan literatur yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan dengan membaca secara kritis teks-teks untuk mengidentifikasi tema-tema utama: urgensi e-participation, teori-teori kunci, contoh kasus Lampung, faktor pendukung/penghambat, dan rekomendasi solusi. Setiap tema kemudian disintesis dan diuraikan dalam narasi penelitian. Analisis komparatif dilakukan bila memungkinkan, misalnya membandingkan kondisi partisipasi digital Lampung dengan daerah lain atau standar nasional. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-eksplanatoris – artinya pertama-tama mendeskripsikan fakta/temuan (misal: sebuah kasus viral di Lampung) lalu menjelaskan implikasi atau maknanya menggunakan konsep teoritis.

Kerangka Analisis: Sesuai struktur tujuan, analisis dalam penelitian akan dibagi ke dalam beberapa aspek: (1) urgensi dan konteks e-participation (global dan lokal), (2) landasan teori/ konsep, (3) paparan fenomena aktual Lampung, (4) identifikasi peluang & tantangan, dan (5) implikasi serta rekomendasi. Masing-masing aspek dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori. Misalnya, untuk fenomena viral di Lampung, dianalisis bagaimana kasus tersebut mencerminkan konsep social accountability dan apa konsekuensinya bagi kebijakan.

**Validitas dan Reliabilitas:** Karena menggunakan data sekunder, validitas bergantung pada keakuratan sumber. Peneliti memastikan triangulasi sumber, yaitu menggunakan multisumber untuk satu informasi kunci. Contoh, data partisipasi internet Lampung diverifikasi dengan beberapa referensi (laporan BPS dan survei lainnya) untuk memastikan konsistensi. Reliabilitas dijaga dengan mencatat referensi secara teliti (menggunakan manajemen referensi) dan hanya mengambil sumber terbaru agar informasi mutakhir (prioritas 5 tahun terakhir, kecuali teori klasik).

**Ruang Lingkup:** Fokus geografis penelitian adalah Provinsi Lampung, meliputi pemerintah provinsi dan ilustrasi di beberapa kabupaten/kota jika relevan. Waktu kajian terutama dekade 2010-an hingga pertengahan 2020-an, di mana perkembangan media sosial dan e-governance sangat pesat. Penelitian ini tidak mencakup survei lapangan pada warga Lampung, namun menggunakan data publik yang tersedia tentang perilaku warga dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan metodologi di atas, diharapkan hasil analisis bersifat komprehensif berbasis bukti (evidencebased) dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara tuntas. Selanjutnya, hasil analisis akan disajikan dalam bab pembahasan berikut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Fenomena Partisipasi Digital Warga di Lampung**

Di Provinsi Lampung, partisipasi warga melalui media digital mulai tampak dalam berbagai bentuk. Secara umum, terdapat dua kategori kanal yang digunakan warga: (1) Platform media sosial dan media daring informal, dan (2) Platform resmi yang disediakan pemerintah daerah (egovernment). Keduanya saling melengkapi dalam mewadahi aspirasi publik.

### **Partisipasi melalui Media Sosial dan Daring Informal.**

Media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, YouTube, hingga TikTok telah menjadi wadah populer bagi warga Lampung untuk menyuarakan pendapat. Warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada forum fisik untuk menyampaikan keluhan atau ide; cukup dengan unggahan digital, suara mereka dapat terdengar luas. Meskipun konten yang memuat informasi tentang kegiatan pemerintah telah diproduksi, tingkat keterlibatannya rendah. Orang lebih menyukai konten dengan foto dan video (Firamadhina & Krisnani, 2021). Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus kritik infrastruktur Lampung yang viral tahun 2023. Seorang pemuda asal Lampung (Bima Yudho Saputro) yang sedang studi di luar negeri mengunggah video kritikan tajam di TikTok dan YouTube mengenai buruknya pembangunan di Lampung, termasuk jalan yang rusak parah. Video ini cepat menyebar dan mendapat respon ribuan komentar serta menjadi perbincangan hangat di Twitter (menjadi trending topic nasional).



Sumber : Kompas.com (2025)

Dampak nyata dari gerakan digital spontan ini sangat signifikan. Awalnya, respon pemerintah daerah terkesan defensif – sempat dilaporkan bahwa keluarga pengkritik didatangi aparat, seolah ada tekanan karena unggahannya. Namun, derasnya dukungan warganet kepada pengkritik justru membalik keadaan. Pejabat pusat turun tangan: Presiden RI bahkan berkunjung ke Lampung (Mei 2023) untuk mengecek kondisi jalan rusak tersebut dan mengalokasikan Rp800 miliar dana pusat guna perbaikan jalan di Lampung. Hal ini menunjukkan bagaimana partisipasi digital dapat memicu akuntabilitas horizontal (warga menekan pemerintah) dan akuntabilitas vertikal (pemerintah pusat mengoreksi kinerja pemerintah daerah). Muncul pula diskursus publik "kenapa harus viral dulu baru diperbaiki?" – sebuah sindiran warganet yang menggarisbawahi harapan agar pemerintah lebih proaktif menanggapi keluhan bahkan sebelum menjadi viral.

Selain kasus di atas, Lampung juga mengenal bentuk partisipasi digital lain seperti petisi online atau kampanye isu lokal via platform daring. Meskipun belum terdokumentasi secara besar-besaran, beberapa inisiatif warga menggunakan situs seperti Change.org untuk isu lingkungan atau pelayanan publik di Lampung mulai muncul. Misal, petisi mengenai penolakan tambang yang merusak lingkungan atau ajakan menghentikan praktik tertentu, telah diinisiasi oleh pegiat lokal dan disebarluaskan melalui Facebook/WhatsApp. Partisipasi semacam ini termasuk digital activism di Lampung, yang walau skalanya terbatas, mencerminkan tumbuhnya kesadaran warga memanfaatkan ruang digital untuk gerakan sosial. Sebab media sosial mendukung kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah dengan mendorong transparansi, menciptakan interaksi dengan warga negara (Rahmanto, 2022)

#### 1. Partisipasi melalui Platform Resmi Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung juga telah menyiapkan kanal digital bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun memperoleh informasi. Salah satu kanal nasional yang diadopsi hingga level daerah adalah SP4N-LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Pemprov Lampung

terhubung dengan sistem LAPOR! ini, bahkan memiliki domain khusus ([lampung.lapor.go.id](http://lampung.lapor.go.id)). Warga dapat mengirim aduan/keluhan mengenai layanan publik atau pembangunan melalui beberapa moda: website, SMS, atau aplikasi. Sosialisasi yang dilakukan, misalnya, Pemprov menyediakan Call Center 0811-790-5000 dan menerima SMS dengan format khusus "lapor [isi aduan]" ke nomor 1708. Pemerintah daerah mendorong warga melampirkan bukti pada laporan digital agar memudahkan tindak lanjut instansi terkait. Melalui SP4N-LAPOR, setiap laporan warga akan tercatat dan terdisposisi ke unit berwenang, dengan target waktu penyelesaian tertentu, sehingga diharapkan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Selain LAPOR!, pemerintah daerah Lampung juga aktif memanfaatkan media sosial resmi sebagai sarana partisipasi dua arah. Akun-akun resmi Pemprov (diskominfotik, humas) di Twitter, Instagram, dan Facebook digunakan untuk menyebarkan informasi kebijakan sekaligus menerima komentar/masukan dari masyarakat. Sebagaimana praktik di banyak daerah, admin media sosial Pemda Lampung kadang menanggapi keluhan warga di kolom komentar atau direct message. Meskipun interaksi ini sulit diukur kuantitasnya, kehadiran pemerintah di ruang digital publik penting untuk menunjukkan keterbukaan. Studi menyebut bahwa instansi publik yang responsif di media sosial dapat membina kedekatan dengan warga dan membangun citra transparan.

Lampung juga telah meluncurkan beberapa aplikasi layanan publik digital. Contoh terkini adalah aplikasi "Lampung Ini" (Lampung Integrated Service) yang diinisiasi Diskominfotik Provinsi Lampung sebagai super-app layanan publik (diluncurkan 2022) – menggabungkan berbagai layanan seperti info pendidikan, kesehatan, administrasi, hingga pengaduan dalam satu aplikasi terpadu. Walau aplikasi seperti ini fokusnya pada layanan, namun fitur umpan balik dan rating layanan di dalamnya memberi ruang bagi warga menilai kinerja pemerintah secara digital. Demikian pula, Pemprov Lampung menjalankan program Smart Village (Desa Cerdas) berbasis digital, yang melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam sistem aplikasi untuk pembangunan desa. Program ini (Pergub No.36/2020) mendorong desa menggunakan aplikasi untuk musyawarah, pendataan, hingga penyaluran aspirasi pembangunan di tingkat desa. Dengan kata lain, hingga ke level desa pun mulai didorong partisipasi digital terstruktur.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa fenomena partisipasi digital di Lampung mulai berkembang melalui jalur formal dan informal. Media sosial memberikan wadah spontan dan luas bagi kritik/dukungan warga (contoh nyata kasus viral jalan rusak), sementara kanal resmi seperti LAPOR! dan aplikasi pemda menawarkan mekanisme yang lebih sistematis untuk aspirasi warga sehari-hari. Kombinasi keduanya, bila dimanfaatkan optimal, bisa saling melengkapi: isu-isu strategis bisa muncul dari percakapan di media sosial, lalu difollow-up secara birokratis via kanal formal untuk solusi konkrit. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, perlu dicermati apa peluang dan tantangan yang ada.

---

## Peluang Partisipasi Digital dalam Mempengaruhi Kebijakan dan Akuntabilitas

Partisipasi warga secara digital menghadirkan sejumlah peluang positif bagi peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kebijakan di daerah Lampung:

1. *Akses Langsung ke Pembuat Kebijakan:* Dengan media digital, warga Lampung kini memiliki jalur komunikasi langsung (tanpa perantara) kepada pemangku kepentingan. Misalnya, melalui Twitter, warga bisa me-mention akun gubernur atau dinas untuk mengangkat isu. Hal ini berpotensi mengikis birokrasi berjenjang yang sering memperlambat penyampaian aspirasi. Ketika pejabat publik aktif di media sosial, terjadi dialog dua arah yang memperpendek rantai umpan balik antara rakyat dan pemerintah. Efeknya, kebijakan dapat lebih peka terhadap kondisi lapangan karena pembuat kebijakan mendengar suara warga secara real-time.
2. *Mobilisasi dan Dukungan Publik yang Cepat:* Ruang digital memungkinkan mobilisasi dukungan publik secara cepat untuk suatu isu. Contoh kasus jalan rusak tadi, dalam hitungan hari dukungan terhadap pengunggah kritik mengalir dari ribuan orang se-Indonesia. Tekanan kolektif seperti ini yang dulu sulit terjadi (karena warga terpecah dan tak saling tahu keluhan masing-masing), kini menjadi mungkin. Keterlibatan sipil dan tata kelola terbuka semakin terdorong dengan e-participation. Artinya gerakan warga yang masif di dunia maya dapat mendorong pemerintah terbuka mengambil tindakan. Pemerintah daerah Lampung dapat melihat ini sebagai peluang: ketika ada isu krusial mendapatkan sorotan luas di internet, itu sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera merespons atau bahkan mengubah kebijakan yang keliru. Dukungan publik online juga bisa dimanfaatkan untuk legitimasi kebijakan. Misal, jika pemda Lampung ingin mengesahkan kebijakan pro-lingkungan, menggalang kampanye dukungan di media sosial akan membantu memperkuat mandat dan kesadaran warganya.
3. *Data Aspirasi untuk Perumusan Kebijakan:* Partisipasi digital meninggalkan jejak data yang dapat diolah. Laporan-laporan warga melalui aplikasi LAPOR!, komentar terbanyak di medsos tentang pelayanan X, petisi dengan ribuan tanda tangan – semua itu adalah masukan kuantitatif maupun kualitatif yang berharga. Jika pemerintah daerah Lampung mengembangkan sistem analitik, suara-suara digital ini dapat ditambang menjadi insight. Contohnya, dari dashboard LAPOR! bisa dilihat sektor apa yang paling banyak dikeluhkan warga (kesehatan, infrastruktur, dll.), sehingga menjadi bahan prioritas perbaikan kebijakan. Penggunaan teknologi big data analytics pada opini publik di media sosial juga dapat membantu pemerintah memahami sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu sebelum maupun sesudah implementasi. Dengan kata lain, e-participation membuka peluang crowdsourcing ide dan evaluasi kebijakan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pemerintah yang memanfaatkan teknologi untuk partisipasi bisa mendapatkan kolaborasi output yang lebih baik (Makhya & Windah, 2020).

4. *Peningkatan Transparansi dan Social Accountability*: Saat warga aktif memantau dan melaporkan kinerja pemerintah secara online, otomatis transparansi meningkat. Pejabat publik tahu bahwa setiap tindakan bisa disorot publik di media sosial, sehingga terdorong lebih berhati-hati dan akuntabel. Misalnya, pengawasan proyek publik oleh warga (melalui unggahan foto di Facebook tentang progres proyek) dapat mencegah penyelewengan. Pada masa pandemi COVID-19, di DKI Jakarta muncul kolaborasi online untuk akuntabilitas sosial (digital accountability) dalam memantau bantuan dan kebijakan. Pola serupa bisa menjadi peluang di Lampung: semisal, komunitas warga+LSM menggunakan platform digital untuk memantau anggaran daerah (APBD) atau kualitas layanan (melalui survei online). Kolaborasi daring untuk akuntabilitas sosial ini menjadi tuntutan masyarakat modern perkotaan. Lampung yang sedang berkembang bisa menangkap peluang ini dengan melibatkan komunitas digital dalam pengawasan program pemerintah.
5. *Inklusivitas Partisipasi yang Lebih Luas*: Berbeda dengan pertemuan fisik yang terbatas jumlah dan rentan didominasi kelompok tertentu, platform digital secara potensial dapat menjangkau lebih banyak orang dari beragam latar. Warga yang mungkin tak pernah hadir di forum desa/kelurahan bisa saja aktif berpendapat di grup Facebook lokal. Generasi muda yang melek internet pun cenderung lebih menyukai menyampaikan aspirasi via online daripada datang ke rapat resmi. Dengan demikian, e-participation dapat meningkatkan basis partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Tentunya hal ini baru menjadi peluang nyata jika hambatan akses dapat diatasi, tetapi setidaknya pintu untuk inklusivitas lebih lebar melalui digital. Contohnya, Musrenbang online (daring) atau jajak pendapat via platform digital bisa melibatkan partisipan jauh lebih banyak daripada musyawarah tatap muka konvensional.

Melihat berbagai peluang di atas, partisipasi digital ibarat dua mata sisi: di satu sisi memudahkan warga memengaruhi arah kebijakan dan menuntut akuntabilitas, di sisi lain menantang pemerintah untuk sigap beradaptasi dalam pola komunikasi baru yang serba cepat dan terbuka. Agar peluang tersebut dapat terwujud, perlu upaya mengatasi kendala-kendala yang ada. Berikut dibahas tantangan utama dalam pelaksanaan partisipasi digital di Lampung.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Partisipasi Digital di Lampung**

Meski menjanjikan, implementasi partisipasi warga berbasis digital di daerah seperti Lampung tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi antara lain:

1. *Kesenjangan Akses Digital (Digital Divide)*: Tidak semua wilayah dan penduduk Lampung menikmati akses internet yang memadai. Wilayah pedesaan atau terpencil menghadapi infrastruktur jaringan yang lebih lemah dibanding perkotaan. Data menunjukkan masih adanya disparitas akses antara area urban dan rural, serta antar

kelompok sosial ekonomi . Sekitar 73,37% penduduk Lampung usia 5 tahun ke atas tercatat pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (Susenas 2022) , yang berarti ada sekitar 26% yang belum tersentuh internet baru-baru ini. Kelompok tanpa akses ini otomatis terpinggirkan dari kanal partisipasi digital. Bahkan bagi yang memiliki akses, kualitas koneksi dan kepemilikan perangkat yang memadai menjadi isu – misal, warga yang hanya punya ponsel jadul tanpa smartphone tentu sulit ikut berpartisipasi di platform online. Kesenjangan ini merupakan tantangan serius untuk memastikan e-participation benar-benar inklusif.

2. *Literasi Digital yang Belum Merata*: Keterbatasan literasi digital merupakan salah satu penghambat terbesar partisipasi online . Banyak warga mungkin memiliki gawai dan internet, namun tidak paham bagaimana memanfaatkan kanal partisipasi secara efektif. Contohnya, warga lansia atau berpendidikan rendah bisa jadi enggan mengisi formulir pengaduan online karena dianggap rumit. Atau mereka tidak tahu bahwa Pemda punya kanal LAPOR yang bisa diakses. Minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang kanal e-participation juga memperburuk keadaan . Pemerintah mungkin sudah membuat aplikasi pengaduan, tapi bila warga tidak diedukasi cara pakainya, partisipasi tak akan optimal. Tantangan literasi ini mencakup kemampuan membaca-menulis di dunia digital, memahami prosedur, hingga etika berinternet. Tanpa literasi yang cukup, warga bisa salah paham (misal: mengadu di kanal yang keliru) atau termanipulasi hoaks sehingga enggan percaya kanal resmi.
3. *Budaya Birokrasi yang Belum Sepenuhnya Adaptif*: Transisi menuju pemerintahan digital yang partisipatif membutuhkan perubahan budaya di kalangan birokrasi. Tantangan internal pemerintah Lampung bisa berupa resistensi aparat terhadap kritik terbuka, kurangnya kapasitas menanggapi aduan online, atau sekadar menjalankan platform partisipasi secara formalitas. Contohnya, jika ada laporan LAPOR! yang masuk, namun instansi terkait lambat merespon atau cenderung defensif, lama-lama warga malas menggunakan kanal tersebut. Kasus di Lampung kemarin menunjukkan adanya oknum yang merespon kritik warga secara reaksioner (mengirim polisi ke rumah pelapor), yang justru kontra-produktif terhadap semangat keterbukaan. Ini mengindikasikan sebagian aparat belum memiliki mindset akuntabel dan terbuka. Tantangan lain, beberapa pejabat mungkin gagap teknologi atau enggan berkomunikasi langsung di medsos. Sehingga akun media sosial pemda kadang hanya dijadikan papan pengumuman satu arah, padahal publik berharap interaksi. Memperbaiki hal ini butuh komitmen perubahan budaya dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
4. *Keamanan Data dan Kepercayaan Publik*: Sebagian warga mungkin khawatir akan keamanan dan kerahasiaan identitas ketika berpartisipasi secara digital. Misalnya, untuk melapor via LAPOR! warga harus mencantumkan identitas; ada kekhawatiran data pribadinya disalahgunakan atau dia akan diintimidasi karena laporannya. Kurangnya kepercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem digital pemerintah merupakan hambatan partisipasi . Terlebih dengan adanya contoh nyata pelapor kritik yang "dicari" aparat, warga bisa semakin takut bicara. Jika pemerintah daerah Lampung ingin partisipasi digital tumbuh, mereka harus mampu meyakinkan

publik bahwa saluran aspirasi yang disediakan aman, bebas risiko, dan ditindaklanjuti secara berintegritas. Tanpa kepercayaan ini, kanal secanggih apapun akan sepi.

5. *Kualitas Platform dan User Experience*: Tantangan teknis juga ada, misalnya antarmuka platform e-government yang tidak ramah pengguna. Bila aplikasi pengaduan desainnya membingungkan, atau website informasi sulit diakses, warga akan frustrasi. Demikian pula, sebagian besar platform pemerintah belum dioptimasi untuk penyandang disabilitas (aksesibilitas rendah). Hal-hal ini menciptakan eksklusi digital bagi kelompok tertentu. Selain itu, integrasi antar sistem sering kurang – warga mungkin harus membuat akun terpisah untuk setiap layanan. Semua ini menyulitkan partisipasi. Tantangan lainnya, respons system yang lambat atau error akan mematikan minat warga. Contoh, jika seseorang mention di Twitter Pemda tetapi tidak pernah dibalas, lama-lama mereka tidak akan repot melakukannya lagi.
6. *Misinformasi dan Distraksi di Dunia Maya*: Ruang digital juga penuh dengan informasi yang tidak tervalidasi. Terkadang isu yang viral belum tentu akurat, namun pemerintah bisa terseret merespon isu yang salah kaprah. Ini tantangan bagi pemda: memilah mana aspirasi murni dan mana yang mungkin digerakkan akun-akun bot atau hoaks. Selain itu, terlalu banyak kanal justru bisa membingungkan jika tidak dikelola baik – contoh, warga Lampung mungkin bingung harus lapor kemana (apakah ke Twitter, ke LAPOR!, atau ke WhatsApp Halo Bupati?). Jika tidak ada integrasi, aspirasi warga terpecah dan bisa jadi tidak ditangani tuntas.
7. *Keterbatasan Infrastruktur Pendukung*: Meskipun internet tersedia, hal-hal seperti listrik di daerah terpencil, kemampuan finansial membeli kuota data, hingga bahasa bisa jadi kendala. Lampung memiliki keberagaman bahasa (Lampung, Jawa, dll.), sehingga komunikasi digital efektif perlu memperhatikan hal ini. Selanjutnya, maintenance platform digital butuh anggaran dan dukungan politik yang konsisten. Jika berganti kepemimpinan lalu sistem yang ada tidak dilanjutkan, partisipasi digital akan terganggu kontinuitasnya.

Semua tantangan di atas menunjukkan bahwa sekadar menyediakan teknologi tidak otomatis menghasilkan partisipasi digital yang aktif. Terdapat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu diatasi. Seperti dikatakan [Harahap \(2023\)](#) dan para ahli, transformasi digital tanpa pendekatan humanis justru bisa memperlebar kesenjangan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu strategi komprehensif agar partisipasi digital dapat berjalan efektif.

### **Implikasi Partisipasi Digital terhadap Akuntabilitas Publik dan Perumusan Kebijakan Daerah**

Berdasarkan uraian fenomena, peluang, dan tantangan di atas, dapat ditarik beberapa implikasi penting dari hadirnya partisipasi digital warga terhadap akuntabilitas dan proses kebijakan di pemerintah daerah Lampung:

1. *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Semakin Diawasi Publik Secara Intens*: Partisipasi digital membuat pemerintah tidak bisa lagi bekerja tertutup. Dengan warga yang sewaktu-waktu bisa mempublikasikan temuan masalah (contoh: foto jalan rusak, video pelayanan buruk di RSUD, dsb) ke media sosial, aparat dituntut meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Setiap kebijakan atau proyek dapat langsung mendapat feedback publik. Implikasinya, pemerintah daerah Lampung perlu membudayakan transparansi proaktif – misalnya, rutin mengumumkan progres proyek, membuka data anggaran, dst – sebelum ditagih warga. Partisipasi digital yang kuat akan membalik paradigma: dari government-driven accountability menjadi citizen-driven accountability (akuntabilitas yang digerakkan warga). Bagi Lampung, hal ini berarti mekanisme check-and-balance tak lagi hanya lewat DPRD atau pengawasan inspektorat, tapi rakyat melalui gadget-nya masing-masing.
2. *Kebijakan Publik Lebih Responsif terhadap Kebutuhan Nyata Warga*: Aspirasi yang disuarakan warga di dunia digital cenderung adalah masalah-masalah nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Ketika pemerintah daerah mau menyerap aspirasi ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, keluhan luas soal jalan rusak langsung direspons dengan kebijakan perbaikan infrastruktur darurat – sebuah reorientasi kebijakan yang dipicu partisipasi warga. Di masa depan, pemda Lampung bisa secara sistematis menggunakan data partisipasi digital (misal tren laporan warga) sebagai salah satu basis perencanaan. Ini implikasinya besar: evidence-based policy tak lagi sebatas data statistik ekonomi, tapi juga data aspirasi rakyat yang terkumpul digital. Dengan demikian, perumusan kebijakan menjadi lebih partisipatif dan demokratis. Warga pun merasa memiliki “saham” dalam kebijakan sehingga meningkatkan kepatuhan dan dukungan saat implementasi.
3. *Perubahan Pola Komunikasi Pemerintah dengan Warga*: Tradisionalnya, komunikasi pemerintah ke warga bersifat satu arah (top-down) melalui pengumuman formal. Partisipasi digital mengubah pola itu menjadi dialogis. Pemerintah Lampung kini perlu membiasakan adanya public discourse di ranah online atas setiap kebijakan. Misalnya, saat akan membuat kebijakan X, mungkin sudah ramai dibahas netizen Lampung plus/minus-nya. Mau tak mau pemerintah harus ikut hadir dalam diskusi tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Ini menuntut kemampuan komunikasi publik yang baru dari para pejabat: lebih transparan, tanggap, dan mampu menjelaskan kebijakan dalam format yang mudah dicerna netizen. Positifnya, komunikasi dua arah ini bila dikelola baik akan membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa suaranya didengar dan direspon cepat, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Kepercayaan inilah modal sosial penting dalam implementasi program.
4. *Penguatan Legitimasi dan Social Capital Pemerintah*: Pemerintah daerah yang membuka diri terhadap partisipasi cenderung mendapat legitimasi lebih kuat. Kebijakan yang melalui proses partisipatif akan sulit ditolak karena publik merasa dilibatkan. Di Lampung, ini bisa membantu misalnya dalam program-program sulit seperti relokasi warga atau pembatasan tertentu: jika dibahas bersama warga di forum digital terbuka,

keputusan akhir lebih legitimated. Partisipasi digital juga membangun social capital berupa jejaring kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan komunitas online. Misal, Pemda bisa menggandeng komunitas blogger Lampung atau influencer lokal untuk sosialisasi program, sehingga terjadi co-creation solusi. EGovernment pun bertransformasi dari sekadar alat birokrasi efisien menjadi ruang baru demokratisasi yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat.

5. *Tuntutan Reformasi Birokrasi Berbasis Digital*: Implikasi lainnya, partisipasi digital memaksa reformasi birokrasi khususnya dalam hal tata kelola pengaduan dan pembuatan kebijakan. Pemerintah harus siap berbenah regulasi internal – misalnya, menetapkan SOP bahwa setiap aduan online harus ditindaklanjuti dalam X hari, atau bahwa usulan masyarakat melalui forum digital tertentu wajib dibahas di Musrenbang. Tanpa penyesuaian mekanisme, aspirasi digital bisa tumpang tindih dengan prosedur formal. Maka Lampung mungkin perlu integrasi: contohnya, masukan dari kanal LAPOR! atau polling online dimasukkan sebagai dokumen resmi lampiran perencanaan pembangunan. Secara tidak langsung, hal ini mendefinisikan ulang proses kebijakan menjadi lebih agile dan adaptif terhadap masukan yang datang kapan saja (tidak melulu terjadwal setahun sekali).
6. Risiko Ketergantungan pada “Viral Policy”: Sebuah sisi lain implikasi yang perlu diwaspadai ialah kecenderungan “viral-based policy”, yakni pemda baru bergerak cepat jika suatu isu sudah viral. Ini sebenarnya cerminan disfungsi jika dibiarkan. Harus diakui, momentum viral mampu menjebol kebuntuan kebijakan, tetapi tidak semua hal bisa menunggu viral. Implikasinya, pemerintah Lampung perlu membangun sistem partisipasi yang sustainable, bukan reaktif semata. Belajar dari kasus viral, Pemda seharusnya membenahi mekanisme monitoring agar keluhan warga dapat tertangkap sebelum menjadi bola liar di media sosial. Dengan memiliki sistem early warning (pemantauan isu di medsos secara proaktif), pemerintah bisa mencegah sentiment negatif berlarut dan menangani masalah lebih dini. Jadi, partisipasi digital seharusnya diinstitutionalisasi, bukan sporadis tergantung viralitas. Media sosial memiliki dampak positif sedang hingga besar terhadap implementasi e-government (Machmud et al., 2021).
7. Secara umum, implikasi dari meningkatnya partisipasi digital warga adalah terjadinya pergeseran paradigma dalam akuntabilitas dan perumusan kebijakan daerah. “Interactivity on Government Social Media to Improve Public Services” menekankan peran interaktivitas sebagai pendorong layanan publik yang lebih baik (Aji et al., 2023). Warga menjadi aktor yang lebih berdaya dalam menentukan agenda lokal, sementara pemerintah ditantang menjadi fasilitator dan eksekutor yang lebih transparan serta tanggap. Ini sejalan dengan prinsip inclusive governance, di mana tata kelola pemerintahan harus mampu menjangkau dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintahan elektronik dan akuntabilitas sebagai tinjauan literatur sistematis, kerangka kerja, dan agenda penelitian masa depan menyajikan tinjauan integratif dan kerangka konsep baru untuk penelitian berikutnya (Antoni et al., 2024)

## Simpulan

Berdasarkan kajian studi literatur dan data sekunder yang dilakukan, beberapa poin kesimpulan utama dari penelitian ini adalah: 1. Urgensi Peningkatan E-Participation di Tingkat Lokal: Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi partisipasi warga dalam pemerintahan daerah. Di Provinsi Lampung, meningkatnya penetrasi internet (sekitar 5,27 juta pengguna di 2020) dan tingginya adopsi media sosial menciptakan momentum bagi e-participation. Urgensi ini dilatarbelakangi kebutuhan memperbaiki akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat melalui pelibatan langsung. Kasus-kasus aktual menunjukkan bahwa suara warga di media digital mampu mendorong perubahan (contoh: perbaikan jalan setelah kritik viral). Dengan demikian, meningkatkan partisipasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan menuju tata kelola lokal yang lebih baik. 2. Landasan Teoretis: Partisipasi digital warga berakar pada nilai-nilai good governance (transparansi, akuntabilitas, responsivitas).

E-governance dan digital democracy menyediakan kerangka bahwa teknologi seharusnya menjadi enabler demokrasi partisipatif, bukan sekadar efisiensi. Teori menunjukkan partisipasi publik via teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kualitas kebijakan, sementara akuntabilitas sosial menegaskan peran aktif warga dalam meminta pertanggungjawaban. Tantangan seperti digital divide dan literasi yang belum merata perlu diatasi agar partisipasi digital benar-benar inklusif. Secara keseluruhan, keberhasilan e-participation tak hanya dinilai dari kecanggihan sistem, tapi sejauh mana memperkuat demokrasi lokal. 3. Fenomena Partisipasi Digital di Lampung: Partisipasi warga Lampung melalui media digital telah muncul dalam dua bentuk utama: melalui media sosial (informal) dan melalui platform formal pemerintah. Di media sosial, warga secara mandiri mengangkat isu publik – seperti kritik infrastruktur yang viral – yang mengundang respons luas dan menekan pemerintah bertindak. Sedangkan di jalur formal, Pemda Lampung menyediakan SP4N-LAPOR!, call center, open data, dan aplikasi layanan publik untuk menampung aspirasi. Keduanya menunjukkan tren ke arah pemerintahan yang lebih terbuka.

Namun implementasinya masih bertahap; partisipasi digital belum menjadi kebiasaan umum seluruh warga, melainkan baru segmen tertentu (terutama kaum muda dan terdidik perkotaan). 4. Peluang dan Tantangan: Partisipasi digital menghadirkan peluang memperkuat akuntabilitas dan mempengaruhi kebijakan: akses warga ke pejabat lebih mudah, mobilisasi dukungan publik cepat, data aspirasi bisa dipakai untuk kebijakan yang evidence-based, serta transparansi kinerja meningkat. Akan tetapi, terdapat tantangan signifikan: kesenjangan akses internet di pedesaan, rendahnya literasi digital bagi sebagian warga, resistensi birokrasi terhadap kritik, kekhawatiran keamanan data, kualitas platform pemerintah yang perlu ditingkatkan, serta maraknya misinformasi yang bisa mengaburkan isu. Hambatan-hambatan ini membuat banyak potensi e-participation belum sepenuhnya terwujud di Lampung. Pemerintah perlu langkah proaktif mengatasi kendala agar

partisipasi digital tidak eksklusif bagi kelompok tertentu saja. 5. Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Kebijakan: Munculnya partisipasi digital di Lampung sudah mulai menggeser cara pemerintah daerah bertanggung jawab dan merumuskan kebijakan. Akuntabilitas pemda kini berada di bawah sorotan publik online yang lebih intens, memaksa peningkatan transparansi.

Kebijakan juga cenderung lebih responsif ketika didorong aspirasi warga (misal penanganan infrastruktur dipercepat akibat desakan publik). Pola komunikasi pemerintahan bergeser menjadi lebih dialogis dan real-time. Namun, ada risiko kebijakan menjadi reaktif hanya saat isu viral; ini perlu diimbangi sistem partisipasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, partisipasi digital memberikan jalan menuju pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan melibatkan warga, tetapi membutuhkan penyesuaian institusional agar efektif.

### Daftar Pustaka

- Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.*
- Asmuddin. (2025). Pengaruh Transformasi Digital terhadap Partisipasi Masyarakat dalam EGovernment. *NUSANTARA: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(1), 14–21.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. In *MIS Quarterly: Management Information Systems* (Vol. 13, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/249008>
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). (2024). *Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. Journal Educational Research and Development* | E-ISSN: 3063-9158, 1(2), 259-263.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2021). PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Ibrahim, R., & Oliy, R. A. (2024). (2024). *Strategi Reformasi Birokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Good Governance Dalam Otonomi Daerah Kecamatan Kwandang. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 769-774.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Makhya, S., & Windah, A. (2020). The influence of social media on public policy changes in

- Bandar Lampung city. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(1), 36–45. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.36.45>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Nurchotimah, A. S. I. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik-Jejak Pustaka*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JrtHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pelayanan+publik+pelayanan+publik+ombudsman&ots=Q2umwBumw4&sig=s4g1G GkehOkWUqojQ11E4K--sQI>
- Oktavia Anggi Ramadhani, Ahren Jasmine Azzahra, Apvira Azhari Siregar, & Aniqotul Ummah. (2024). Analisis Keterlibatan Warga Digital melalui Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2058>
- Pribadi, U., Aji, J. S., Saharuddin, E., Sos, S., Ahdarrijal, Y., IP, S., ... & IP, S. (2024). (2024). *Smart Government Berbasis Partisipasi Publik. Samudra Biru*.
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Veronika, R., Ginting, B., Arindani, D., Mega, C., Lubis, W., & Shella, A. P. (2022). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2), 118–122. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/10869>
- Yanto, P., Jumanah, J., & Sutoto, S. (2024). (2024). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-PARTICIPATION IN PUBLIC POLICY IN INDONESIA: POTENTIAL, CHALLENGES AND IMPACT ON THE QUALITY OF PUBLIC POLICY. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 182-200.